



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III - 2025

**BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANGKA BELITUNG**

Kompleks Perkantoran
Pemprov. Kep. Bangka Belitung,
Jl. Profesi No. 4 Pangkalpinang 33149
Telp : 0717-434756; Fax : 0717-4262434
Email : op.skipmpangkalpinang@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2025 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pangkalpinang dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini menjadi sarana transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025. Selain itu, laporan ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja SKIPM Pangkalpinang selama Triwulan III Tahun 2025, baik dari aspek operasional, pengelolaan sumber daya, maupun indikator prioritas lainnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran pegawai dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi, sehingga pelaksanaan tugas SKIPM Pangkalpinang pada Triwulan III Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Pangkalpinang, 06 Oktober 2025

Kepala



Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.3. Strategi Organisasi	2
1.4. Sistematika Penyajian	3
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	4
2.1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	4
2.2. Pengukuran Kinerja	6
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	7
3.1. Capaian Kinerja	7
3.2. Analisis dan Evaluasi	7
3.3. Realisasi Anggaran	22
3.4. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	22
BAB 4. PENUTUP	23
4.1. Kesimpulan	23
4.2. Rekomendasi	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Pangkalpinang Tahun 2025	4
Tabel 2	Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan III 2025	19
Tabel 3	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III 2025	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi SKIPM Pangkalpinang	2
Gambar 2.	Dashboard Capaian IKU pasa sistem aplikasi pengelolaan kinerja	7

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) SKIPM Pangkalpinang Triwulan III Tahun 2025 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja SKIPM Pangkalpinang Triwulan III Tahun 2025 diukur dengan membandingkan target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada tiap perspektif yang relevan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi SKIPM Pangkalpinang Tahun 2025 untuk mencapai kondisi yang diinginkan sebagai suatu outcome/impact dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kegiatan SKIPM Pangkalpinang selama Triwulan III Tahun 2025.

Capaian kinerja SKIPM Pangkalpinang Triwulan III Tahun 2025 diukur berdasarkan realisasi terhadap 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terbagi dalam 3 Sasaran Kegiatan (SK). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh nilai 114,91 yang termasuk dalam kategori "Istimewa" menurut klasifikasi capaian strategi instansi. Nilai ini mencerminkan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).

Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

4. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).
5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).

Sasaran Kegiatan 3: Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).
7. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).
8. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
9. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).
10. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).
11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
12. Persentase rencana umum pengadaan (PBJ) yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).

13. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
14. Jumlah inovasi pelayanan publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (unit).
15. Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).

Pada Triwulan III Tahun 2025, SKIPM Pangkalpinang melaksanakan kegiatan melalui program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 5.788.481.000. Hingga akhir Triwulan III ini, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 3.496.692.383, atau setara dengan 60,39% dari total pagu yang tersedia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan good governance adalah prinsip akuntabilitas, yaitu kewajiban setiap entitas penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam upaya menciptakan birokrasi pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Sejalan dengan amanat tersebut, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu instrumen utama dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini juga menjadi media evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan, termasuk dalam penggunaan anggaran negara secara efektif dan efisien.

Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pangkalpinang memiliki mandat penting dalam mendukung kebijakan strategis nasional, khususnya dalam menjamin mutu, keamanan, dan keberterimaan hasil perikanan baik di pasar domestik maupun internasional.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKIPM Pangkalpinang selama kurun waktu April hingga Juni 2025. Laporan ini juga diharapkan menjadi alat kendali bagi manajemen internal dalam meningkatkan kinerja organisasi, serta menjadi sarana komunikasi dan transparansi kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

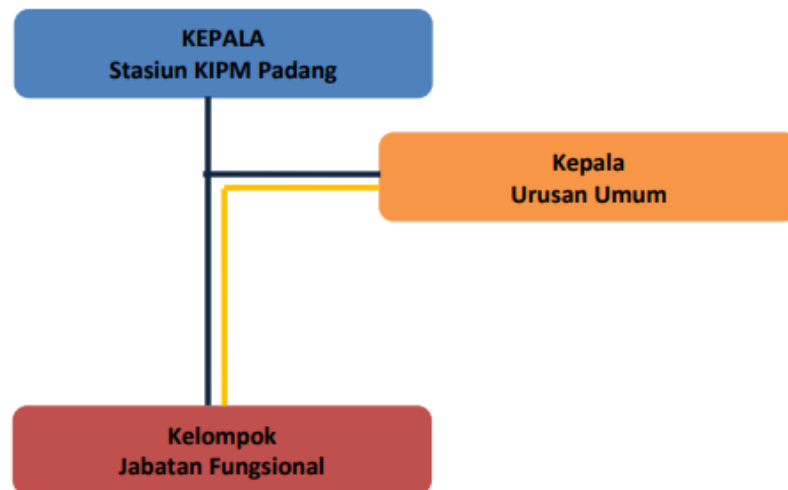
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pangkalpinang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

Subbagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran; pelaporan; hubungan masyarakat; organisasi dan tata laksana; persuratan; kearsipan; dokumentasi; rumah tangga; serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas teknis pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing pejabat fungsional, yang meliputi di antaranya pengendali mutu hasil perikanan, analisis mutu, dan pengawas perikanan.

Kelompok Jabatan Fungsional, yang meliputi pejabat fungsional Karantina Ikan, Pengendali Mutu, Pengawas Perikanan, Analis Kepegawaian, dan tenaga teknis lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

Struktur organisasi ini mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan secara menyeluruh, serta memastikan penyelenggaraan layanan publik yang profesional dan sesuai standar Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 1. Struktur Organisasi SKIPM Pangkalpinang

1.3. STRATEGI ORGANISASI

Arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program Stasiun KIPM Pangkalpinang disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka sasaran strategis SKIPM Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, dengan dukungan indikator sebagai berikut:

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)
2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)

Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai standar, dengan indikator:

4. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)
5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)

Sasaran Kegiatan 3 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yang didukung oleh indikator sebagai berikut:

6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (Nilai)
7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (Nilai)
8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)
9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)
10. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)
11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)
12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)
13. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)
14. Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Unit)
15. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)

Sasaran-sasaran di atas menjadi kerangka arah strategi dan operasional pelaksanaan program serta kegiatan pada SKIPM Pangkalpinang selama Tahun 2025, dengan pendekatan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil (outcome).

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKJ Triwulan III Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Bab I–Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II–Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
- c. Bab III–Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Bab IV–Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Sasaran dan indikator kinerja SKIPM Pangkalpinang Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Pangkalpinang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	70
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	70
		.3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)	75
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)	92

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (Nilai)	71,5
	8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%)	100
	9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (Indeks)	87
	10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (Nilai)	86
	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%)	85
	12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%)	76
	13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%)	70%
	14	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (Unit)	1
	15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (Nilai)	88

Berdasarkan rincian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama Tahun Anggaran 2025, terdapat enam indikator yang menjadi target capaian Triwulan III Tahun 2025. Adapun indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%).
2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%).
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%).
4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Pangkajene (Nilai)
5. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (nilai).
6. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (Nilai)

7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
8. Persentase Rencana Umum Pengadaan (PBJ) yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
9. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)

Kesembilan indikator tersebut menjadi fokus evaluasi utama SKIPM Pangkalpinang dalam mengukur kinerja pada Triwulan III Tahun 2025. Capaian terhadap indikator-indikator ini mencerminkan tingkat kesiapan dan efektivitas pelaksanaan program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kepatuhan terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel.

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum adalah 120;
- b. Angka minimum adalah 0;
- c. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

1) Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

2) Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi/Target})\} \times 100\%$$

3) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target

- 4) Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut



≥100
(BAIK)



70 ≤ X ≤ 99
(CUKUP)

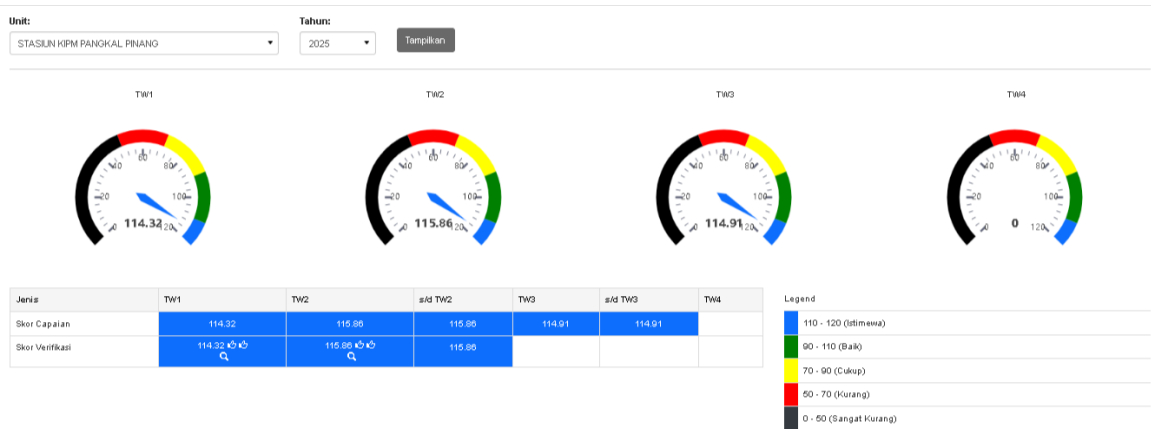


X < 70%
(KURANG)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja SKIPM Pangkalpinang Triwulan III Tahun 2025 mendapat predikat istimewa, hal ini ditandai dengan nilai capaian kinerja sebesar 114,91%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go



Gambar 2. Dashboard Capaian IKU pasa sistem aplikasi pengelolaan kinerja

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Sasaran Kegiatan 1 :Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana produk hasil kelautan dan perikanan dari sektor produksi primer telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan.

Sektor produksi primer mencakup kegiatan budidaya perikanan—meliputi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), serta Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)—dan perikanan tangkap yang mencakup Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di kapal. Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian terhadap standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Hasil Perikanan, mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan persyaratan teknis lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) menjadi pendekatan utama dalam menjamin mutu dan keamanan pangan sejak dari hulu. Hasil dari kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk

rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan hasil inspeksi, baik melalui sistem Online Single Submission (OSS) maupun secara manual.

Pada Tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 70%, sedangkan realisasi capaian pada Triwulan III mencapai 92,86%, atau setara dengan capaian kinerja 120%. Hasil ini menunjukkan komitmen kuat dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan mutu oleh SKIPM Pangkalpinang, serta tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang telah ditetapkan.

SP.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan											
IK-1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang											
Realisasi TW III 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA BPPMHKP 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	-	70	70	92,68	132.40	132.40	70	132.40	

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi produk perikanan yang telah melalui proses pasca panen dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan standar keamanan pangan yang berlaku.

Sektor pasca panen mencakup kegiatan seperti penanganan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, yang bertujuan untuk menjaga mutu, memperpanjang masa simpan, serta meningkatkan nilai tambah produk. Kesesuaian standar mutu dinilai berdasarkan penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta kepemilikan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) oleh unit pengolahan, dengan ruang lingkup yang merujuk pada jenis produk, proses, dan potensi bahaya yang ditangani.

Upaya menjamin mutu dan keamanan pangan dilaksanakan secara menyeluruh melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) dari tahap pra-produksi hingga tahap akhir distribusi, dengan rujukan standar baik dari SNI, Codex Alimentarius, maupun standar lain yang disyaratkan dalam sistem perdagangan nasional dan internasional.

Pada Tahun Anggaran 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 70%. Hasil pelaksanaan kegiatan di Triwulan III menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang berarti tingkat capaian kinerja mencapai 120%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem jaminan mutu pasca panen di wilayah kerja SKIPM Pangkalpinang telah berjalan optimal dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

SP.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan										
IK-2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang										
Realisasi TW III 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA BPPMHKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	-	-	70	70	100	142.86	142.86	70	142.86

IK3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merupakan indikator untuk mengukur perbandingan antara volume atau jumlah produk perikanan yang diterima oleh negara tujuan dengan total produk yang diajukan untuk ekspor. Nilai indikator ini mencerminkan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu yang dilakukan oleh SKIPM Pangkalpinang dalam menjamin kesesuaian produk ekspor dengan persyaratan yang ditetapkan oleh negara mitra dagang.

Semakin tinggi rasio ini, semakin menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan efektif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan nasional, tetapi juga memperkuat daya saing sektor perikanan Indonesia di tingkat global.

Setiap produk perikanan yang diekspor diwajibkan memenuhi berbagai standar dan persyaratan teknis dari otoritas kompeten negara tujuan seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan negara lainnya. Pemenuhan standar tersebut antara lain melalui implementasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang mencakup penerapan HACCP, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), serta sertifikasi mutu lainnya sesuai peraturan perdagangan internasional.

Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 99%. Capaian pada Triwulan III menunjukkan realisasi sebesar 100%, atau setara dengan 101,01% dari target, yang menandakan bahwa seluruh produk yang diajukan untuk ekspor telah diterima oleh negara tujuan. Hal ini mengindikasikan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar mutu ekspor dan membuktikan kinerja pengawasan yang baik oleh SKIPM Pangkalpinang.

SP.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan										
IK-3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang										
Realisasi TW III 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA BPPMHKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	-	-	99	99	100	101.01	101.01	70	142.86

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai standar

IK4. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pada UPT SKIPM Pangkalpinang merupakan hasil penilaian yang diperoleh melalui evaluasi sistematis terhadap tingkat kepatuhan laboratorium dalam menerapkan standar mutu yang berlaku, khususnya yang mengacu pada ISO/IEC 17025:2017. Nilai ini disajikan dalam bentuk persentase yang mencerminkan tingkat kesesuaian terhadap berbagai kriteria mutu yang telah ditetapkan dalam standar tersebut.

Skor capaian yang tinggi mengindikasikan bahwa laboratorium telah melaksanakan sebagian besar persyaratan sistem manajemen mutu secara konsisten, baik dari aspek teknis maupun manajerial, sehingga proses pengujian dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi ekspektasi akreditasi. Sebaliknya, skor yang lebih rendah menunjukkan bahwa masih terdapat area yang perlu diperbaiki, baik dalam hal dokumentasi, implementasi prosedur, kompetensi personel, maupun ketertelusuran hasil uji.

Sebagai standar internasional untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi, ISO/IEC 17025:2017 menjadi rujukan utama dalam menjamin kompetensi laboratorium serta memastikan keberterimaan hasil uji secara nasional maupun internasional. Penerapan standar ini sekaligus mendukung tujuan SKIPM Pangkalpinang dalam menjaga kualitas layanan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, terutama dalam konteks sertifikasi, kegiatan karantina ikan, dan pelayanan teknis lainnya.

Perhitungan capaian indikator kinerja nilai kualitas sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang Tahun 2025 dilakukan secara tahunan melalui mekanisme evaluasi internal yang terstruktur, meliputi audit internal, tinjauan manajemen, pengendalian mutu, serta pemantauan kesesuaian terhadap pedoman teknis. Hasil capaian ini menjadi dasar bagi UPT dalam menetapkan langkah perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) guna memastikan laboratorium tetap kompeten, kredibel, dan memenuhi tuntutan pemangku kepentingan.

SP.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai standar											
IK-4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang											
Realisasi TW III 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA BPPMHKP 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	75	-	

IK5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Penilaian terhadap kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi di UPT SKIPM Pangkalpinang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses inspeksi berjalan sesuai prinsip ketertelusuran, ketidakberpihakan, serta konsistensi teknis. Nilai capaian yang dihasilkan menggambarkan tingkat kesesuaian lembaga inspeksi terhadap persyaratan yang diatur dalam ISO/IEC 17020:2012, dan dinyatakan dalam bentuk persentase untuk memudahkan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

Persentase capaian yang tinggi menandakan bahwa mayoritas persyaratan standar telah diterapkan secara efektif—mulai dari pengelolaan dokumen, kompetensi personel inspeksi, mekanisme kalibrasi alat bantu pemeriksaan, hingga pengendalian risiko ketidakberpihakan. Sebaliknya, capaian yang lebih rendah mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan, baik terkait tata kelola inspeksi, sistem pencatatan, maupun pembuktian objektivitas hasil pemeriksaan.

Sebagai standar internasional yang mengatur tata cara kerja lembaga inspeksi, ISO/IEC 17020:2012 memberikan kerangka kerja agar setiap kegiatan pemeriksaan dilakukan secara sistematis, akurat, dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Bagi UPT SKIPM Pangkalpinang, penerapan standar ini menjadi landasan dalam menjamin mutu layanan pemeriksaan fisik, kesehatan ikan, kelayakan unit, dan verifikasi lainnya yang berkaitan dengan jaminan mutu hasil perikanan.

Pengukuran capaian indikator kinerja mutu lembaga inspeksi dilakukan setahun sekali, melalui rangkaian kegiatan evaluasi internal yang mencakup pemeriksaan penerapan prosedur, audit mutu, validasi teknis, serta peninjauan berkala oleh manajemen. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan dan memastikan bahwa sistem manajemen mutu terus berkembang sesuai kebutuhan operasional dan tuntutan regulasi terbaru.

SP.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai standar											
IK-5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang											
Realisasi TW III 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA BPPMHKP 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	75	-	

Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pengelolaan anggaran pada setiap satuan kerja pemerintah, termasuk UPT SKIPM Pangkalpinang. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana, efisien, efektif, serta mematuhi seluruh ketentuan regulasi yang berlaku. Nilai IKPA diperoleh dari data proses pelaksanaan anggaran yang tercatat dalam aplikasi OMSPAN.

Capaian IKPA dihitung berdasarkan kepatuhan satker terhadap delapan komponen indikator, yaitu:

1. Revisi DIPA
Menilai ketepatan dan efisiensi proses revisi anggaran. Satker dinilai mampu melakukan revisi hanya jika diperlukan dan sesuai ketentuan sehingga tidak mengganggu alur pelaksanaan kegiatan.
2. Deviasi RPD (Rencana Penarikan Dana)
Menggambarkan selisih antara jadwal rencana penarikan dana dengan realisasi penarikan di lapangan. Deviasi yang kecil menunjukkan bahwa satker telah merencanakan penarikan dana secara realistis dan disiplin.
3. Penyerapan Anggaran
Mengukur kemampuan satker dalam mengeksekusi anggaran sesuai target triwulan dan tahunan. Tingkat penyerapan yang baik menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pada UPT SKIPM Pangkalpinang.
4. Belanja Kontraktual
Komponen ini menilai ketepatan pelaporan kontrak barang/jasa serta percepatan pelaksanaan belanja berbasis kontrak. Penilaiannya menggunakan bobot komposit:
 - Ketepatan waktu input kontrak (40%)
 - Kontrak dini (30%)

- Akselerasi belanja modal (30%)
5. Penyelesaian Tagihan
Mengukur kecepatan satker dalam memproses tagihan SPMLS Non Belanja Pegawai. Standar yang digunakan adalah penyelesaian maksimal 17 hari kerja sejak serah terima pekerjaan.
 6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan UP (TUP)
Revolving UP dilakukan minimal satu kali setiap bulan tanpa keterlambatan, sedangkan pertanggungjawaban TUP wajib diselesaikan dalam satu bulan sesuai surat pernyataan penggunaan, tanpa menyisakan dana yang dikembalikan.
 7. Dispensasi SPM
Satker dinilai baik apabila mampu menghindari permintaan dispensasi penerbitan SPM, karena hal tersebut menunjukkan kedisiplinan dalam perencanaan dan proses administrasi belanja.
 8. Konfirmasi Capaian Output
Output kegiatan wajib dikonfirmasi paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya untuk memastikan kesesuaian antara realisasi anggaran dan realisasi output. Komponen ini mendukung prinsip belanja berkualitas (spending better) dalam penganggaran berbasis kinerja.

Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menjadi dasar penilaian kualitas tata kelola anggaran di UPT SKIPM Pangkalpinang, sekaligus menjadi acuan dalam menjaga akuntabilitas, ketepatan waktu, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun berjalan.

SP.3 Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-6 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang											
Realisasi TW III 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA BPPMHKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	92	-

IK7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada UPT SKIPM Pangkalpinang merupakan gambaran atas kualitas penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, serta ketepatan perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran. Penilaian ini digunakan untuk melihat keterhubungan antara rencana anggaran yang telah disusun dengan realisasi yang dicapai, sekaligus menilai apakah alokasi anggaran benar-benar mendukung pencapaian output dan tujuan program yang ditetapkan.

Nilai kinerja dihitung melalui evaluasi terhadap dua komponen utama, yaitu aspek implementasi dan aspek manfaat. Aspek implementasi menilai kesesuaian antara rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan, termasuk ketepatan dalam eksekusi anggaran yang telah direncanakan. Sementara itu, aspek manfaat mengukur nilai tambah yang dihasilkan dari pelaksanaan anggaran terhadap capaian output maupun dampak program. Kedua aspek ini diberikan bobot tertentu, dan nilai akhir kinerja anggaran diperoleh dari penggabungan bobot tersebut sehingga menghasilkan satu nilai kinerja yang mencerminkan kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja.

Proses pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada UPT SKIPM Pangkalpinang dilakukan setiap tahun melalui aplikasi Online Monitoring SMART DJA, yang menjadi platform resmi Kementerian Keuangan dalam melakukan monitoring, validasi, serta evaluasi atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada seluruh satuan kerja. Hasil penilaian ini menjadi dasar bagi satker dalam melakukan perbaikan perencanaan pada tahun anggaran berikutnya serta memastikan bahwa anggaran yang disusun tetap relevan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang											
Realisasi TW III 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA BPPMHKP 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	-	71,50	-	-	-	-	81,5	-	

IK8. Prosntase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan tindak lanjut satuan kerja terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan maupun aspek kepatuhan lainnya. Pemeriksaan BPK menghasilkan opini sebagai bentuk pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, yang dinilai berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kelengkapan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Opini tersebut dapat berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), WTP dengan paragraf penjelas, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, atau Tidak Menyatakan Pendapat.

Setiap rekomendasi yang diterbitkan BPK harus ditindaklanjuti oleh satuan kerja sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa potensi kelemahan pengendalian internal dapat diminimalkan. Persentase penyelesaian temuan menunjukkan sejauh mana rekomendasi tersebut telah dipenuhi melalui langkah-langkah perbaikan yang konkret, mulai dari pembenahan

administrasi, harmonisasi prosedur, penguatan pengendalian intern, hingga perbaikan proses pelaporan keuangan. Tingkat penyelesaian yang tinggi mencerminkan komitmen satker dalam mendukung kualitas laporan keuangan kementerian secara keseluruhan.

Pengukuran capaian indikator persentase penyelesaian temuan BPK pada UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang dilakukan secara tahunan, karena tindak lanjut rekomendasi merupakan siklus yang mengikuti periode pemeriksaan laporan keuangan tahun sebelumnya. Dengan demikian, pada periode triwulan berjalan, satker belum memiliki nilai capaian sebelum hasil pemutakhiran data tindak lanjut direkap secara resmi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta BPK. Hasil pengukuran ini menjadi dasar evaluasi kinerja sekaligus acuan dalam memperkuat tata kelola keuangan di lingkungan UPT.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan										
IK-8	Prosentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang										
Realisasi TW III 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA BPPMHKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-

IK9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Indeks Profesionalitas ASN pada UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugasnya, meliputi aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Pengukuran ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa profesionalitas ASN harus tercermin dalam kemampuan teknis, perilaku kerja, dan kepatuhan terhadap norma struktural maupun etika jabatan. Nilai indeks ini memberikan gambaran sejauh mana pegawai pada satuan kerja memiliki kesesuaian latar belakang pendidikan dengan jabatan, memenuhi standar kompetensi, menunjukkan capaian kinerja yang baik, serta menjaga kedisiplinan sebagai unsur pembentuk integritas aparatur.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan setiap tahun oleh Biro SDMA Sekretariat Jenderal, dengan menggunakan data kepegawaian yang telah tervalidasi pada berbagai sistem informasi. Hasil pengukuran tersebut kemudian menjadi dasar evaluasi dalam pengembangan kualitas ASN, termasuk pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi dan perbaikan manajemen SDM. Pada Triwulan III tahun berjalan UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang tidak memiliki nilai capaian.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan										
IK-9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang										
Realisasi TW III 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA BPPMHKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	82	-

IK10. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Penilaian Mandiri SAKIP pada UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang merupakan bagian dari upaya penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menekankan pentingnya manajemen kinerja yang terukur, berorientasi hasil, dan sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi. SAKIP menjadi instrumen untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja dilakukan secara sistematis sehingga satuan kerja dapat menunjukkan keterkaitan yang jelas antara anggaran, program, dan hasil (outcomes). Pelaksanaan evaluasi mandiri ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja unit pemerintah.

Dalam proses penilaian, rekonsiliasi kinerja menjadi komponen penting yang menggambarkan keselarasan antara Laporan Kinerja, Target Kinerja, dan strategi pencapaiannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Rekonsiliasi tersebut menilai beberapa unsur yang meliputi kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen kinerja, ketepatan hubungan antara target dan realisasi pada setiap indikator, serta tingkat ketercapaian indikator kinerja utama dan indikator kegiatan selama periode penilaian. Ketiga unsur ini mencerminkan seberapa baik UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang menjalankan siklus manajemen kinerja secara utuh mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan.

Karena proses evaluasi SAKIP dilakukan secara tahunan, nilai Penilaian Mandiri SAKIP untuk UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang belum tersedia pada Triwulan berjalan. Hasil penilaian akan ditetapkan setelah seluruh dokumen kinerja tahunan direviu dan direkonsiliasi oleh unit pembina kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang											
Realisasi TW III 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA BPPMHKP 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	86	-	

IK11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan indikator yang mengukur tingkat implementasi terhadap rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan, baik internal maupun eksternal, sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Fungsi pengawasan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, standar mutu, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, setiap rekomendasi yang diberikan harus ditindaklanjuti secara nyata dan dijadikan pijakan dalam melakukan perbaikan menyeluruh terhadap proses kerja organisasi.

Di lingkungan UPT SKIPM Pangkalpinang, pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan meliputi berbagai perbaikan, seperti penyempurnaan prosedur layanan, penguatan sistem manajemen, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Pelaksanaan rekomendasi ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kelemahan yang ditemukan, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan publik.

Pada Tahun Anggaran 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 85%. Hingga Triwulan III, indikator ini berhasil direalisasikan sebesar 100%, dengan capaian kinerja sebesar 117,65%. Hasil ini mencerminkan bahwa seluruh rekomendasi yang diterima telah dimanfaatkan secara maksimal dan efektif untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang											
Realisasi TW III 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA BPPMHKP 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	-	85	85	100	117.65	117.65	85	117.65	

IK12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan instrumen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa pemerintah. RUP disusun oleh setiap satuan kerja dan diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk menginformasikan secara terbuka kegiatan pengadaan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar nilai pengadaan barang/jasa yang telah diumumkan melalui SIRUP dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan yang dimiliki oleh satuan kerja. Semakin tinggi persentase pengumuman RUP, maka semakin baik kualitas perencanaan pengadaan serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

Ketentuan mengenai kewajiban penyusunan dan pengumuman RUP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 11 ayat (1).

Pengukuran indikator ini dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{(Nilai RUP yang diumumkan di SIRUP / Pagu Pengadaan Barang dan Jasa)} \times 100\%$$

Apabila jumlah nilai pengadaan yang diumumkan melebihi pagu pengadaan, maka kelebihan tersebut akan dihitung sebagai pengurang capaian dalam analisis indikator ini. Oleh karena itu, ketepatan nilai dan kesesuaian dengan pagu menjadi aspek penting.

Langkah-langkah pelaksanaan yang dilakukan oleh UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang antara lain:

1. Melakukan koordinasi antara operator SIRUP, KPA, dan PPK terkait rincian kegiatan pengadaan.
2. Menginventarisasi rencana kegiatan dan anggaran dalam dokumen RKA-K/L.
3. Melakukan unggah data kegiatan pengadaan barang/jasa secara lengkap dan tepat waktu ke dalam aplikasi SIRUP.

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 76%, dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 120%. Data capaian ini menunjukkan bahwa SKIPM Pangkalpinang telah melaksanakan pengumuman RUP secara maksimal sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang											
Realisasi TW III 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA BPPMHKP 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	-	76	76	100	131.58	131.58	76	131.58	

IK13. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Persentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas pada UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang merupakan indikator yang digunakan untuk menilai komitmen dan konsistensi satuan kerja dalam menerapkan Sistem Antikorupsi sebagaimana diatur dalam Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP. Penilaian ini berfokus pada kesiapan dokumen serta implementasi langkah-langkah penguatan integritas yang menjadi bagian dari pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk memastikan bahwa dokumen yang disusun satker telah mencerminkan upaya nyata dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas tata kelola.

Penetapan nilai pembangunan integritas dilakukan berdasarkan penilaian terhadap enam komponen utama sistem antikorupsi, yaitu pembangunan zona integritas yang memiliki bobot penilaian sebesar 30%, program pengendalian gratifikasi berbobot 15%, penanganan pengaduan masyarakat dan whistleblowing system dengan bobot 15%, penanganan benturan kepentingan dengan bobot 15%, pelaporan harta kekayaan ASN (LHKAN) berbobot 15%, serta komponen pengendalian kecurangan yang memiliki bobot 10%. Nilai pada masing-masing komponen tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat kelengkapan dokumen, konsistensi pelaksanaan, dan akuntabilitas langkah-langkah penguatan integritas yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja.

Karena penilaian pembangunan integritas dilaksanakan secara tahunan oleh Inspektorat Jenderal, maka pada Triwulan III tahun berjalan UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang belum memperoleh nilai capaian. Nilai akan ditetapkan setelah seluruh dokumen dievaluasi sesuai siklus penilaian tahunan, dan hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai dasar peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas pada tahun berikutnya.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan										
IK-13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene										
Realisasi TW III 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA BPPMHKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	70	-

IK14. Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene

Inovasi Pelayanan Publik pada UPT Stasiun KIPM Pangkajene merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan satuan kerja dalam menghadirkan pembaharuan layanan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha. Inovasi ini dapat berupa penyederhanaan proses layanan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan, maupun pengembangan mekanisme pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Upaya inovasi pelayanan publik bertujuan mendorong terciptanya pelayanan yang responsif, akuntabel, serta mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi pengguna layanan di lingkungan Stasiun KIPM.

Pengukuran kinerja inovasi dilakukan untuk menilai sejauh mana satuan kerja mampu menghasilkan perubahan yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan, mulai dari efisiensi waktu layanan, kemudahan prosedur, peningkatan kepuasan pengguna, hingga penguatan integrasi layanan berbasis teknologi. Inovasi yang dihasilkan tidak hanya dinilai dari keberadaannya, tetapi juga dari kesesuaian dengan prinsip reformasi birokrasi, keberlanjutan pelaksanaan, serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja pelayanan karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Pada Triwulan III tahun berjalan, UPT Stasiun KIPM Pangkajene belum memiliki nilai capaian untuk indikator Inovasi Pelayanan Publik karena proses penilaian dan verifikasi inovasi layanan dilakukan tahunan. Penetapan nilai akan mengikuti penilaian resmi yang dilakukan setelah evaluasi inovasi diselesaikan oleh unit pembina di tingkat kementerian.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan										
IK-14	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene										
Realisasi TW III 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA BPPMHKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

IK15. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi yang dihasilkan dari pengukuran terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan publik. Survei ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan, dalam hal ini UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang.

Pengumpulan data IKM dilakukan menggunakan sistem survei elektronik (e-survey SKM), melalui laman resmi <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>. Melalui aplikasi ini, para pengguna jasa dapat menyampaikan pendapat dan penilaian mereka secara langsung terhadap layanan yang mereka terima.

Kuesioner survei disusun berdasarkan 9 unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan Sarana dan Prasarana

Setiap unsur memiliki bobot yang sama, yakni:

$$\text{Bobot per unsur} = \frac{1}{9} = 0,1111$$

Nilai IKM dihitung dengan metode rata-rata tertimbang dari nilai persepsi masyarakat terhadap tiap unsur pelayanan, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = A = \left(\frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Jumlah Unsur yang Terisi}} \right) \times \text{Bobot Penunjang}$$

Pada Triwulan III Tahun 2025, nilai IKM yang diperoleh oleh UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang adalah 97,46, dari target yang ditetapkan sebesar 88. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencapai 110,75%, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah melampaui ekspektasi pengguna jasa dan ditanggapi secara positif oleh masyarakat.

Realisasi TW III 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA BPPMHKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	-	-	88	88	97.46	110.75	110.75	92	110.75

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM PANGKALPINANG pada tahun anggaran sebesar Rp. 5.788.481.000 Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 5.596.471.000 dan PNPB sebesar Rp. 192.010.000

Realisasi penyerapan anggaran SKIPM PANGKALPINANG pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai Rp. . 3.496.692.383 atau sebesar 60,39 %. Rekapitulasi penyerapan anggaran SKIPM Pangkalpinang T.A 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3

Tabel 2. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan III 2025

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW III	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	5.439.481.000	3.416.796.558	62,83
2	Pengendalian Mutu	205.000.000	23.805.825	11,61
3	Manajemen Mutu	144.000.000	56.090.000	39,95
	TOTAL	5.788.481.000	3.496.692.383	60,39

Tabel 3. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI TW III	%
1	Belanja Pegawai	3.081.582.000	2.252.167.306	73,13
2	Belanja Barang	2.706.899.000	1.244.525.077	45,97
	TOTAL	5.788.481.000	3.496.692.383	60,39

3.4. EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran pada UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang bertujuan untuk menilai sejauh mana satuan kerja mampu mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya anggaran secara optimal. Efisiensi ini mencerminkan kemampuan satker dalam mengelola alokasi anggaran secara tepat sasaran, meminimalkan pemborosan, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tugas dan fungsi pelayanan karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan. Upaya efisiensi dilakukan melalui optimalisasi perencanaan kegiatan, pemanfaatan SDM secara efektif, serta penyesuaian pelaksanaan program agar tetap berjalan produktif sesuai koridor anggaran yang tersedia.

Pada Triwulan III Tahun 2025, UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang menargetkan enam kegiatan yang menjadi bagian dari indikator kinerja unit. Keseluruhan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan dukungan anggaran DIPA Tahun 2025 yang dialokasikan sebesar Rp 5.788.481.000. Hingga akhir periode Triwulan III, realisasi anggaran telah mencapai Rp 3.496.692.383, atau sebesar 60,39% dari total pagu. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien, dengan capaian yang sejalan dengan progres realisasi output pada periode pelaporan. Peningkatan efisiensi dicapai melalui pemanfaatan waktu dan sumber daya secara tepat, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan agar tetap fokus pada target prioritas.

Capaian ini menggambarkan bahwa UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi penggunaan anggaran dan pencapaian target kinerja. Dengan pengelolaan anggaran yang terukur, kegiatan operasional dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi kualitas layanan maupun akuntabilitas pelaksanaan program.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan capaian indikator kinerja pada Triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang secara umum telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini tercermin dari nilai capaian kinerja sebesar 114,9132% yang termasuk kategori Istimewa berdasarkan klasifikasi capaian strategi instansi.

Beberapa indikator yang menjadi target capaian Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target, di antaranya:

- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (120%).
- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (120%).
- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima negara tujuan ekspor (101,01%).
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (117,65%).
- Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan di SIRUP (120%).
- Survei Kepuasan Masyarakat (109,18%).

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi serapan hingga akhir Triwulan III mencapai Rp 3.496.692.383,- atau sebesar 60,39% dari total pagu anggaran sebesar Rp 5.788.481.000,-, yang masih berada dalam rentang normal pelaksanaan awal tahun anggaran.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang pada Triwulan III menunjukkan efektivitas pelaksanaan tugas, akuntabilitas pelaporan, serta komitmen terhadap pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

4.2. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya serta mempertahankan pencapaian yang telah diraih, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. Meningkatkan koordinasi lintas fungsi dalam rangka memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan agar capaian tetap konsisten dan optimal.
2. Mempercepat realisasi anggaran, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung terhadap layanan publik dan dukungan teknis, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap indikator yang belum menjadi target pada Triwulan II, sebagai langkah antisipatif guna menjamin pencapaian target tahunan.

4. Menjaga kualitas layanan publik dan memperkuat umpan balik dari masyarakat melalui optimalisasi kanal survei elektronik, serta terus melakukan perbaikan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat.
5. Memastikan seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai prinsip keterbukaan, melalui pengelolaan SIRUP yang tepat waktu dan akurat.

Dengan pelaksanaan rekomendasi yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang mampu terus mendorong peningkatan kinerja sekaligus mempertahankan prestasi yang telah dicapai. Dedikasi terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta komitmen terhadap inovasi berkesinambungan, akan menjadi fondasi utama dalam memperkuat mutu pelayanan dan daya saing organisasi ke depan.